

## DETERMINAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19

**Sahala Purba<sup>1</sup>**

Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia  
[Sahala824@gmail.com](mailto:Sahala824@gmail.com)

**Septony Benyamin Siahaan<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia  
[Valen250315@gmail.com](mailto:Valen250315@gmail.com)

**Farida Sagala<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia  
[faridasgl1984@gmail.com](mailto:faridasgl1984@gmail.com)

**Rahel Junita<sup>4</sup>**

Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia  
[rachel.junita0306@gmail.com](mailto:rachel.junita0306@gmail.com)

**Tonida Charles Duha<sup>5</sup>**

Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia  
[tonidacharles@gmail.com](mailto:tonidacharles@gmail.com)

Diterima 5 Mei 2022  
Disetujui 13 Juni 2022

***Abstract**— This research aims to determine and analyze the impact of the internal control system, human resource capacity, inspection, and apparatus skills on village financial accountability in villages in Siempat Nempu Hulu District, Dairi Regency. This type of research is causal associative research and uses primary data. The data collection method used is a questionnaire. The study method used in this research is descriptive analysis and multiple linear regression. This research was conducted in 12 villages in Siempat Nempu Hulu Subdistrict, Dairi Regency, and each village had 3 respondents, namely the head of the village government, the village secretary and the head of finance, so that the number of respondents was 36 people. This research was conducted in April - May 2021. The results of this research show that the internal control system, Human Resource Capacity and apparatus skills have a positive and significant impact, while the audit has a negative impact on village financial accountability in villages in Siempat Nempu Hulu District, Dairi Regency.*

**Keywords:** *Internal Control System; Human Resource Capacity; Examination; Apparatus Skills; And Village Financial Accountability*

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

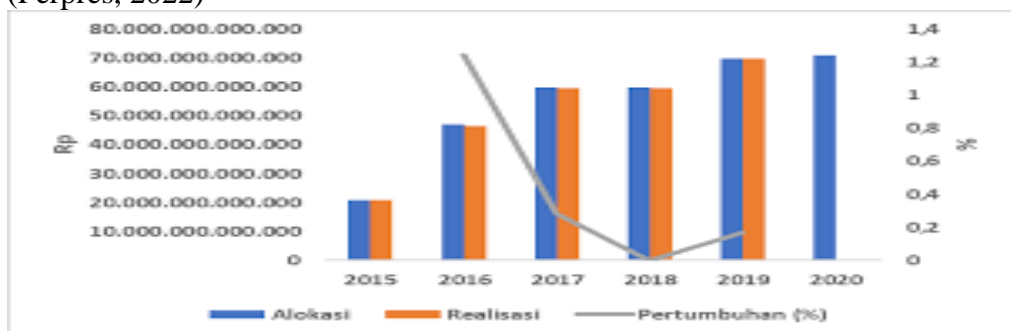
Fonema dalam riset ini adalah pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa yang begitu besar terutama dalam penanganan Covid-19 ini yaitu dalam pemakaian dana desa untuk BLT, padat karya serta penanganan gizi buruk, yang menjadi masalah apakah program ini dapat

diterapkan pada desa saat ini, dimana desa masih banyak mengalami kelemahan dari segi sumber daya manusia dan penerapan teknologi informasi.

Adapun peran Dana desa dalam penanganan Covid-19 ini adalah pilihan pertama pemakaian Dana Desa pada saat ini ialah kegiatan bantuan sosial seperti BLT Desa. BLT Desa adalah bantuan uang tunai terhadap rakyat yang kurang mampu pada desa tersebut dan dananya berasal dari Dana Desa. Bantuan ini bermanfaat untuk menolong warga tidak mampu, meminimalkan akibat ekonomi pada masa pandemi Covid-19, serta dapat menaikkan penghasilan dalam rangka menaikkan daya beli warga yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. BLT Desa tahun ini didistribusikan senilai 40% dari alokasi Dana Desa yang ada di Indonesia ini, atau secara menyeluruh alokasi Dana Desa sebesar Rp27,2 triliun untuk BLT Desa tahun ini. Dalam rangka membantu pendanaan penindakan pandemi Covid-19 termasuk konfirmasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam skala kecil yang terdapat pada desa, pemakaian Dana Desa paling minim senilai 8% dari pagu Dana Desa setiap desa. jumlahnya paling sedikit 8% tersebut di luar dan tidak termasuk pemodal untuk BLT Desa. Dana Desa yang ditetapkan pemakainnya (earmark) untuk pemodal penindakan pandemi Covid-19 pada tahun ini sebesar minimal Rp5,4 triliun.

Kegiatan berikutnya adalah model Padat Karya kas dalam perwujudan Dana Desa diinginkan mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan pembayaran upah secara kas terhadap tenaga kerja yang aktif, baik gaji harian ataupun bulanan, akibat dapat menaikkan daya beli warga, menaikkan pertumbuhan ekonomi, dan kebahagiaan warga setempat. Pada masa covid ini, kegiatan setiap warga sangat didambakan akan kedatangannya untuk membantu warga dalam mendapatkan lapangan pekerjaan.

Pandemi ini sangat ditakutkan oleh pemerintah akan terjadinya kenaikan jumlah stunting baru. Akibat terjadinya pandemi bagi penghasilan warga akan berakibat pada rendahnya penyerapan gizi kepada anak-anak mereka khususnya pada anak balita. strategi pembuatan anggaran pun dapat berdampak pada kuota dana untuk kegiatan pencegahan stunting. penetapan pekerjaan masyarakat juga menimbulkan terhentinya fasilitas Posyandu. Adanya Dana Desa membut sangat penting dalam kekurangan yang ada sebab Dana Desa menjadi salah satu penunjang pembiayaan dalam rangka penangkalan stunting. Fokus perhatian pemerintah kepada rakyat dinampakkan pada penetapan prioritas implementasi Dana Desa. Penerapan Dana Desa diinginkan dapat menolong masyarakat yang terkena pandemi dan perbaikan ekonomi nasional dengan cara menaikkan kesejahteraan warga dari desa yang merupakan membina masyarakat terkecil. Tugas Desa sangat diperlukan sebagai perwakilan pemerintah dalam mengolah dana desa secara tepat sasaran, murah, prudent, keterbukaan, dan akuntabel akibatnya kebahagiaan rakyat semakin naik serta menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional. (Perpres, 2022)



Gambar 1. Grafik Alokasi, Realisasi dan pertumbuhan Dana Desa selama 2015-2020

Sumber: [berkas.dpr.go.id](https://berkas.dpr.go.id)

Adapun fenomena lain yang terjadi adalah: a) kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Desa dalam Tatakelola Keuangan Desa dimana timbulnya pengharapan pada 1,2 orang Perangkat Desa yang memahami IT; dan Kurangnya pemahaman pentingnya keterbukaan Tatakelola Keuangan Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa. Sehingga dibutuhkan peningkatan Kapasitas bagi Kades, Perangkat Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Baik BPD, LPMD, Karangtaruna dll yang lebih spesifik (Admin, 2021), b) Pemeriksaan belum semuanya mencakup penilaian atas kecocokan APB Desa dengan skala prioritas pemakaian Dana Desa, serta belum adanya termuan yang dilakukn tindak lanjut perbaikan dalam laporan hasil pemeriksaan. (Kresno, 2019), c) Masyarakat berhak menanyakan ketransparanan kepala desa dalam pemakaian dana desa. (Tumangger, 2019), d) pemakaian dana desa di Sungai Raya Dairi diduga bermasalah. (Gunawan, 2021). e) Diduga, banyak penyelewengan dana atas pembangunan Pamsimas. Tujuan pemerintah dalam program Pamsimas adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa dalam menyalurkan Air Bersih ke masyarakat. Tetapi Kepala Desa Lae Markelang dan kroni kroninya diduga tidak merealisasikan dana tersebut dengan maksimal atau tidak tepat sasaran. (Marbun, 2021)

Akuntabilitas keuangan keuangan desa bermasalah bisa disebabkan oleh system pengendalian internal yang lemah, hal ini disebabkan tidak adanya pengendalian yang baik dalam tatakelolakeuangan desa akibatnya pertanggungjawabannya menjadi lemah sehingga dapat menimbulkan banyak terjadi penyelewengan keuangan desa akibatnya penggunaan keuangan desa tidak tepat sasaran dan banyak juga aparap pemerintah desa yang kena jerat hokum yang bisa dilihat dari berita-berita yang beredar selama ini, jadi dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik dalam organisasi akan dapat menaikkan akuntabilitas keuangan desa yang semakin baik, hal ini didukung oleh peneliti terdahulu (Putra et al., 2021); (Sari & Andra Asmara, 2021); (Ramadhan & Fefri Indra Arza, 2021); (Suharti & Rumsari, 2021); (Yennisa et al., 2020); (Karyadi, 2019); (Wahyuni et al., 2018); dan (Wahyuni et al., 2018), yang mengutarakan bahwa system pengendalian internal berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa, akan tetapi tidak setara dengan riset yang dibuatoleh (Pahlawan et al., 2020); (Sundari & Mulyadi, 2018); dan (Mutmainah & Pramuka, 2017) yang mengutarakan system pengendalian internal tidak berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa.

Kapasitas sumber daya manusia dapat memperkuat akuntabilitas keuangan desa, hal ini bisa dilihat banyak kapasitas sumber daya manusia yang lemah pada pemerintahan desa akibatnya laporan pertanggungjawabannya sering terlambat dan banyak koreksi yang dibuata akibat kapasitas sumber daya manusia aparat pemerintah yang lemah, dengan kapasitas sumber daya manusia yang tinggi dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa sehingga fenomena terjadinya keterlambatan dan koreksi kesalahan dalam pelaporan keuangan dapat dikurangi, hal ini setara dengan riset yang dibuatoleh (Nurhayati et al., 2021); (Latif et al., 2021); (Azkia et al., 2016); (P. et al., 2020); (Karyadi, 2019) yang mengutarakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa, akan tetapi tidak setara dengan (Mahyudin et al., 2022); dan (Posi & Putra, 2019) yang mengutarakan bawah kapasitas sumber daya manusia tidak berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa.

Pemeriksaan juga dapat memdampaki akuntabilitas keuangan desa, jika pemeriksaan betul-betul dibuatdengan baik oleh pihak internal dalam hal ini BPD (Badan Perwakilan desa) dan pemeriksaan External (Inspektorat) maka akan dapat memperkuat akuntabilitas keuangan desa, yang terjadi selama ini kurangnya pemeriksaan dari pihak internal dan pihak external yang mengakibatkan banyak laporan keuangan desa tidak dipercayai oleh pihak masyarakat setempat yang mengakibatkan adanya demo yang menuntut keterbukaan dari pemerintahan

desa betul dilakukan. Hal ini setara dengan riset yang dibuat oleh (Making & Handayani, 2021); (Widia Yulianti et al., 2019); (Aprilia, 2019); (Umaira & Adnan, 2019) yang mengutarakan bahwa pemeriksaan berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa, tetapi tidak setara dengan riset yang dibuat oleh (Indriswari & Wianto Putra, 2021) yang mengutarakan bahwa pemeriksaan tidak berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa.

Akuntabilitas keuangan desa juga didampaki oleh kecakapan aparatur, jika kecakapan aparturnya rendah akan dapat memdampaki kapasitas akuntabilitas keuangan desa, hal ini bisa dilihat bahwa pada umumnya pendidikan aparat pemerintah desa mayoritas tammatan SLTA, ini salah satu penyebab kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa, hal ini diperkuat rata-rata pendapatan desa 90% bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat, dalam hal ini kurangnya motivasi aparat pemerintah desa untuk mengalih kapasitas sumber daya alam yang terdapat dalam desa tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh riset yang dibuat oleh (Mohammad Akbar Hakiki & Syarif Hidayat, 2022); (Rifa'i et al., 2021); (Puspa & Prasetyo, 2020); dan (Pahlawan et al., 2020) yang mengutarakan bahwa kecakapan aparatur berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa, akan tetapi tidak setara dengan riset yang dibuat oleh (Suharti & Rumsari, 2021); (Sweetenia et al., 2019); (Widyatama et al., 2017) yang mengutarakan bahwa kecakapan tidak berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa.

Adapun perbedaan riset ini adalah memasukkan variable pemeriksaan dan kapasitas sumber daya manusia dalam hubungannya dengan akuntabilitas keuangan desa, dan riset ini belum pernah diteliti pada desa yang terdapat dikecamatan Siempat Nempu Hulu oleh peneliti lain serta penelitian ini dilakukan pada masa covid-19.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang riset ini, maka rumusan masalah riset ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa dalam masa pandemi covid-19?
2. Apakah kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa dalam masa pandemi covid-19?
3. Apakah pemeriksaan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa dalam masa pandemi covid-19?
4. Apakah kecakapan aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa dalam masa pandemi covid-19?

## 1.3 Landasan Teori

### 1.3.1 Agency Theory

Laporan keuangan yang berkapasitas sangat dibutuhkan oleh pihak eksternal. Dalam teori agensi, penjelasan tentang akuntansi dipakai dengan dua tujuan. Pertama, dipakai untuk pengambilan kebijakan oleh pemilik dan manajemen. Dan kedua, dipakai untuk menilai dan mengklasifikasi hasil sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati (Raharjo, 2007).

Teori ini merupakan rancangan yang menerangkan kaitan antara perjanjian antara pemilik dengan manajemen. Pemikiran mengenai kemampuan keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang bermutu terletak pada teori ini, pengendali perusahaan dibuat dengan ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku (Rachmad, 2013). Zimmerman & Wieder (1977) masalah keagenan juga ada dalam lingkungan lembaga pemerintahan. Rakyat sebagai principal menyerahkan kewenangan kepada pemerintah sebagai agen, untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam bentuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari teori

ini, principal baik rakyat secara langsung harus melakukan pemeriksaan kepada agen baik pemerintah maupun para politisi. Fadzil & Nyoto dalam jurnal (Hardiningsih et al., 2019) juga mengutarakan bahwa terdapat keterikatan antara pemerintah pusat serta pemerintah desa. Pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal dan pemerintah desa bertindak sebagai agen. Hal ini dipicu Indonesia sebagai negara kesatuan, pemerintah desa harus bertanggung jawab terhadap rakyat sebagai pemilih dan juga kepada pemerintah pusat. Hubungan kontraktual tersebut menghasilkan masalah yang dikenal dengan masalah keagenan (adverse selection dan moral hazard) dan masalah keagenan ini diawali dari adanya asimetri informasi antar pihak (Mahawyahrti & Budiasih, 2016).

### 1.3.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan keuangan desa adalah tugas agen untuk menyajikan laporan dan mengungkapkan semua aktivitas dan aktivitas yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan utama agen. Adapun Indikator akuntabilitas sesuai (Permendagri, 2018) Pasal 70 adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa menyampaikan informasi akuntabilitas pengbujet desa melalui camat kepada bupati / walikota setiap akhir tahun bujet.
2. Dalam kurung 3 bulan sesudah akhir periode bujet informasi pertanggungjawaban wajib diserahkan.
  - a. informasi keuangan, antara lain :
    - 1) Informasi realisasi APBDes
    - 2) Catatan terhadap laporan keuangan
  - b. Informasi realisasi aktivitas
 

Daftar aktifitas yang masuk ke desa, daftar sektor, Kegiatan lokal serta kegiatan lainnya.

### 1.3.3 Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut (PP, 2008) adalah proses terintegrasi dari tindakan dan aktivitas yang berkelanjutan oleh semua pemimpin dan karyawan untuk memastikan kepercayaan yang cukup dalam pencapaian target entitas melalui aktivitas yang efektif dan efisien. Pelaporan keuangan, perlindungan aset nasional dan kepatuhan kepada hukum dan peraturan.

Adapun indikator sistem pengendalian internal sesuai (PP, 2008)

1. Lingkungan Pengendalian
 

Dalam lingkungan yang terkendali, pimpinan lembaga negara harus menciptakan dan memelihara perilaku yang positif dan konstruktif untuk menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
2. Evaluasi Risiko
 

Melakukan evaluasi risiko membutuhkan kepemimpinan dari lembaga pemerintah. Penilaian risiko yang dibahas meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko.
3. Aktivitas Pengendalian
 

Dalam aktivitas pengendalian, pimpinan lembaga negara melaksanakan aktivitas pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat fungsi dan fungsi lembaga pemerintah yang bersangkutan.
4. Informasi dan Komunikasi
 

Informasi dan Komunikasi Pimpinan instansi pemerintah harus mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi secara tepat waktu.
5. Pemantauan Pengendalian Internal.

Para pemimpin lembaga negara harus memantau sistem pengendalian internal. Tindak lanjut dibuat dengan terus menindaklanjuti audit dan review lainnya, penilaian individu, dan rekomendasi selanjutnya.

Dalam teori agency pihak agen dalam hal ini pemerintah desa harus betul melaksanakan system pengendalian internal kepada akuntabilitas keuangan desa agar jangan terjadi penyimpangan-penyimpangan akan penggunaan keuangan desa. System pengendalian internal yang baik jika tatakelola keuangan desa dapat dibuat secara efisien dan efektif penggunaannya sehingga laporan pertanggungjawabannya akan bisa memuaskan pihak principal dalam hal pemerintah daerah/pemerintah pusat dan khususnya masyarakat desa setempat. Senada dengan riset yang dibuat oleh (Putra et al., 2021); (Sari & Andra Asmara, 2021); (Ramadhan & Fefri Indra Arza, 2021); (Suharti & Rumsari, 2021); (Yennisa et al., 2020); (Karyadi, 2019); (Wahyuni et al., 2018); dan (Wahyuni et al., 2018) yang mengutarakan bahwa system pengendalian internal berdampak secara positif dan signifikan kepada akuntabilitas keuangan desa. Dari teori dan riset terdahulu penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Sistem pengendalian internal berdampak positif dan signifikan kepada akuntabilitas keuangan desa.**

### 1.3.4 Kapasitas Sumber Daya Manusia

Faktor terutama dalam pemerintahan adalah sumber daya manusia. Karena dia adalah operator proyek, mengendalikan dan melakukan semua aktivitas dan aktivitas entitas ekonomi dan menghasilkan laporan keuangan yang berkapasitas.

Adapun indikator kapasitas sumber daya manusia menurut Flippo yang dikutip Priansa (2014:147) adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendidikan

Pendidikan melibatkan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman tentang seluruh lingkungan kerja. Selain itu, studi terlibat dalam menjawab (bagaimana), mengapa (mengapa), dan pendidikan, secara umum, lebih banyak terlibat.

#### 2. Pelatihan

Pelatihan adalah proses perubahan perilaku yang sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan terkait dengan prestasi dan keterampilan pekerjaan.

#### 3. Pengalaman

Pengalaman adalah ketika seseorang mengukur lamanya suatu pekerjaan atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami pekerjaan tersebut dan melakukannya dengan baik.

Pada teori agency pihak principal menginginkan organisasi yang dimiliki harus berjalan secara berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi organisasi yang didirikan, maka dengan demikian agar organisasi tersebut berjalan secara berkesinambungan maka pihak agen yang dikontrak harus mempunyai sumber daya manusia yang berkapasitas sehingga dapat menjalankan organisasi yang dia pimpin sesuai dengan kepentingan principal, maka dengan demikian kapasitas sumber daya manusia yang bagus dapat berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa, senada dengan pernyataan riset yang dibuat oleh (Nurhayati et al., 2021); (Latif et al., 2021); (Azkia et al., 2016); (P. et al., 2020); dan (Karyadi, 2019) bahwa kapasitas sumber daya manusia dapat berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa. Dari teori dan riset terdahulu tersebut penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

## **H<sub>a2</sub>: Kapasitas Sumber Daya Manusia berdampak kepada Akuntabilitas Keuangan desa**

### **1.3.5 Pemeriksaan**

Pemeriksaan umumnya mengacu pada aktivitas administrasi untuk mengontrol apakah penilaian kegiatan yang telah siap sesuai dengan planing. Oleh karena itu, jika ada kesalahan atau penyimpangan yang tidak cocok dengan target yang ingin diharapkan, maka perlu menentukan implementasinya, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki acara berikutnya.

Adapun indikator pemeriksaan sesuai (Permendagri, 2016) pasal 31 adalah sebagai berikut:

1. menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
  - a. BPD dan Kepala Desa merumuskan rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD atau Kepala Desa.
  - b. Rancangan peraturan desa akan dibahas sebelum peninjauan BPD dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal BPD menerima rancangan peraturan desa.
2. Menyerap dan mencetuskan harapan masyarakat desa
  - a. Implementasi aktivitas untuk mendukung keinginan masyarakat dibuatoleh Sekretariat BPD.
  - b. BPD mengelola aspirasi masyarakat desa dengan mengatur dan menetapkan polanya.
  - c. BPD mengkomunikasikan aspirasi masyarakat secara lisan dan atau tertulis dalam review BPD yang dihadiri oleh kepala desa.
  - d. Audiensi BPD diadakan untuk mengambil keputusan tentang isu-isu strategis BPD.
3. Melakukan pemeriksaan prestasi kepala desa
  - a. Gubernur dan Bupati/ Walikota melakukan pembinaan dan pemeriksaan kepada implementasi peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
  - b. Pemeriksaan kepada persiapan aktivitas Pemerintah Desa.
  - c. Pemeriksaan kepada implementasi aktivitas.
  - d. Pemeriksaan kepada pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.  
Penilaian atas prestasi Kepala Desa selama satu tahun budget.

Dalam teori agency pihak principal membentuk pemeriksaan kepada prestasi agen, pemeriksaan ini bisa bersifat internal dan pemeriksaan external yang tujuannya untuk mencegah terjadi penyimpangan-penyimpangan sewaktu menjalankan organisasi, sehingga jika terjadi penyimpangan yang dibuatoleh agen, maka pihak pemeriksaan dapat memberikan teguran kepada pihak agen agar melakukan perbaikan, sehingga penyimpangan yang terjadi cepat diatasi untuk mencegah kerugian yang besar yang dialami organisasi. Dengan pemeriksaan yang baik dari internal dalam hal ini Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Pemeriksaan external yaitu inspektorat dan masyarakat desa setempat, maka diharapkan akan memberikan akuntabilitas keuangan desa yang semakin baik. Pernyataan ini didukung oleh riset yang dibuat oleh (Making & Handayani, 2021); (Widia Yulianti et al., 2019); (Aprilia, 2019); dan (Umaira & Adnan, 2019) yang mengutarakan bahwa pemeriksaan berdampak positif dan signifikan kepada akuntabilitas keuangan desa. Dari teori dan riset terdahulu maka penulis menarik hipotesis:

## **H<sub>a3</sub>: Pemeriksaan berdampak positif dan signifikan kepada akuntabilitas keuangan desa.**

### 1.3.6 Kecakapan Aparatur

Kecakapan aparatur adalah sifat yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai hasil prestasi tinggi. pekerja yang tidak mempunyai skill yang memadai tidak akan bekerja terus menerus dan membuang-buang material, waktu dan tenaga.

Adapun indikator kecakapan aparatur sesuai (BKN, 2013) adalah sebagai berikut:

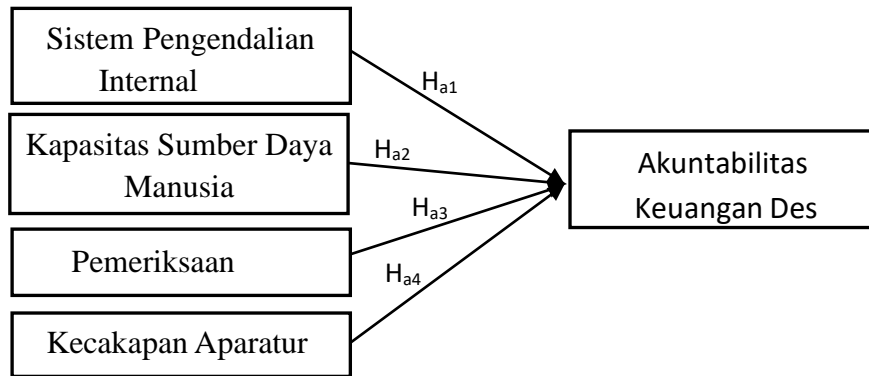
1. Pengetahuan adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah berupa fakta, informasi dan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman baik teori maupun praktik.
2. Keahlian teknis, yaitu kemampuan untuk menemukan solusi atas kecakapan kerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, meliputi:
  - a. Keterampilan melaksanakan pekerjaan individual.
  - b. Keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan.
  - c. Keterampilan merespon masalah kerja yang berbeda.
  - d. Keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja.
  - e. Keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/lingkungan kerja yang berbeda.
3. Inisiatif kerja, keramahan dan kesopanan Sikap kerja merupakan perilaku birokrasi yang mengedepankan perasaan dan perasaan dalam bentuk minat, sikap, rasa syukur, dan metode adaptasi kerja.

Pada teori agency, principal menginginkan agar agen yang dia kontrak mempunyai kecakapan dalam bidangnya masing-masing, sehingga organisasi yang dipimpin oleh agen dapat berjalan sesuai dengan keinginan principal organisasi yang dia miliki dapat berkelanjutan dan bahkan menjadi semakin besar, dengan demikian juga untuk pemerintahan desa pihak principal dalam hal ini pemerintah pusat serta masyarakat setempat menginginkan agar aparat pemerintahan desa yang bekerja dalam desa tersebut adalah aparatur yang berkecakapan dibidang masing-masing, karena selama ini dilihat aparat yang bekerja dalam pemerintahan desa tersebut adalah aparat yang memenangkan kepala pemerintahan pada masing-masing desa, sehingga tidak memperdulikan apakah dia memiliki kecakapan atau tidak hanya sebatas balas jasa saja. Seharusnya dengan kecakapan aparatur yang bagus akan dapat menaikkan akuntabilitas keuangan desa, hal ini setara dengan riset yang dibuat oleh (Mohammad Akbar Hakiki & Syarif Hidayat, 2022); (Rifa'i et al., 2021); (Puspa & Prasetyo, 2020); dan (Pahlawan et al., 2020) yang mengutarakan bahwa kecakapan aparatur berdampak positif dan signifikan kepada akuntabilitas keuangan desa. Dari teori dan riset terdahulu, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>a4</sub>: Kecakapan Aparatur berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa.**



1.3.7 Model Riset



Gambar 3. Model Riset

2. METODOLOGI DAN ANALISIS DATA

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi pada riset ini adalah aparat pemerintahan desa yang terdapat pada Desa di Kecamatan Kecamatan Siempat Nempu Hulu yaitu sebanyak 12 Desa. Sampel dalam riset ini adalah seluruh populasi akan di teliti dengan penentuan responden berdasarkan ukuran tertentu (purposive sampling). Tolak ukur yang dipakai untuk memilih responden adalah aparatur serta pejabat tatakelola Keuangan Desa yang terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggung jawab dan kaur keuangan sebagai pemegang kas dan sekretaris desa sebagai tatakelola kebijakan APBDesa. Maka dalam setiap desa akan diambil 3 responden, maka sampel dalam riset ini sebanyak 36 sampel.

2.2 Operasional Variabel

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Akuntabilitas Keuangan Desa (Y)	Akuntabilitas keuangan keuangan desa adalah tugas agen untuk menyajikan laporan dan mengungkapkan semua aktivitas dan aktivitas yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan utama agen.  Widyatama (2017)	1. Kepala desa menyampaikan informasi akuntabilitas bujet desa melalui camat kepada bupati / walikota setiap akhir tahun bujet. 2. Dalam kurung 3 bulan sesudah akhir periode bujet informasi pertanggungjawaban wajib diserahkan. a. informasi keuangan, antara lain : 1) Informasi realisasi APBDes 2) Catatan terhadap laporan keuangan b. Informasi realisasi aktivitas c. Daftar aktifitas yang masuk ke desa, daftar	Likert

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
		sektor, Kegiatan lokal serta kegiatan lainnya. Permendagri No 20 Pasal 70 Tahun 2018	
Sistem Pengendalian Internal (X <sub>1</sub> )	Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut (PP, 2008) adalah proses terintegrasi dari tindakan dan aktivitas yang berkelanjutan oleh semua pemimpin dan karyawan untuk memastikan kepercayaan yang cukup dalam pencapaian tujuan organisasi melalui aktivitas yang efektif dan efisien. Pelaporan keuangan, perlindungan aset nasional dan kepatuhan kepada hukum dan peraturan (PP No. 60 Tahun 2008)	1. Lingkungan Pengendalian 2. Evaluasi Risiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian internal  PP No. 60 pasal 3 ayat 1 Tahun 2008	Likert
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X <sub>2</sub> )	Faktor terutama dalam pemerintahan adalah sumber daya manusia. Karena dia adalah operator proyek, mengendalikan dan melakukan semua aktivitas dan aktivitas entitas ekonomi dan menghasilkan laporan keuangan yang berkapasitas.  (Mendey, 2015)	1. Pendidikan berkaitan dengan pengetahuan 2. Pelatihan 3. Pengalaman  Priansa (2014:147)	Likert
Pemeriksaan (X <sub>3</sub> )	Pemeriksaan umumnya mengacu pada aktivitas administrasi untuk mengontrol apakah penilaian kegiatan yang telah siap sesuai dengan planing. Oleh karena itu, jika ada kesalahan atau penyimpangan yang tidak cocok dengan target yang ingin diharapkan  (Sujamto, 1996)	1. Menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa 2. Menyerap dan mencetuskan harapan masyarakat desa 3. Melakukan pemeriksaan prestasi kepala desa  (Permendagri, 2016) pasal 31	Likert

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kecakapan Aparatur (X <sub>4</sub> )	Kecakapan aparatur adalah sifat yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai hasil prestasi tinggi. pekerja yang tidak mempunyai skill yang memadai tidak akan bekerja terus menerus dan membuang-buang material, waktu dan tenaga. (Hevesi, 2005)	1. Pengetahuan 2. Keahlian teknis 3. Inisiatif Kerja  (BKN, 2013)	Likert

### 2.3 Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan pada riset ini ialah analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*). Data riset ini dikerjakan dengan memakai aplikasi *Statistical Package for Social Science (SPSS)* Versi 23. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk melihat apakah variable akuntabilitas keuangan desa bisa diukur dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen yakni system pengendalian internal, kapasitas sumber daya manusia, pemeriksaan, kecakapan aparatur.

Jenis riset yang dipakai adalah riset asosiatif yang bersifat kausal atau kausal. Dan riset ini juga bersifat korelatif atau korelatif untuk mengetahui keterkaitan antara dua variabel. Waktu investigasi dimulai dari proses pencarian hingga selesainya investigasi. Persamaan matematika dalam pola regresi linier berganda yang dipakai pada pengujian hipotesis dalam riset ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4 X_4 + e$$

Variabel Y adalah Akuntabilitas Keuangan Desa, a adalah konstanta, b<sub>1</sub> hingga b<sub>4</sub> adalah koefisien Regresi, X<sub>1</sub> adalah Sistem Pengendalian Internal, X<sub>2</sub> adalah Kapasitas Sumber Daya Manusia, X<sub>3</sub> adalah pemeriksaan dan X<sub>4</sub> adalah Kecakapan Aparatur serta e adalah kesalahan.

### 2.4 Analisis Kualitas Data - Uji Validitas dan Realiabilitas

Uji valid dipakai dalam menghitung sah atau tidak sahnya suatu kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner sanggup untuk mengutarakan sesuatu yang akan di dihitung oleh kuesioner tersebut. Ghazali (2016:52), menghitung validitas dapat diperbuat dengan mengukur hubungan antara poin permasalahan dengan total poin variabel. poin variabel yang memiliki tingkat signifikan di bawah 0,05. Uji signifikan diperbuat dengan membandingkan angka r hitung (nilai Correlation Item-Total Correlation) dengan r table untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini asalah jumlah sampel. Jika angka r hitung > r tabel maka jawaban tersebut dinyatakan valid.

Uji reliabilitas ialah instrumen untuk mengevaluasi apakah suatu kuisisioner yang menjadi tolak ukur dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau akurat jika respon dari setiap responden terhadap permasalahan adalah konstan atau stabil dari masa ke masa (Ghozali:2013). Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika memberikan angka Cronbach Aplha > 0,60 (Ghozali : 2013).

## 2.5 Uji Asumsi Klasik

### 2.5.1 Uji Normalitas

Pengujian Normalitas data berguna dalam mengenal peredaran data pada variabel yang akan dipakai dalam riset. Data yang benar dan layak dipakai dalam riset ialah data yang mempunyai distribusi normal. Pada riset ini dipakai uji statistik untuk menemukan apakah residual berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013).

### 2.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas berguna untuk menilai koneksi antara variabel bebas. bentuk regresi yang benar sebaiknya tidak terjadi koneksi antara variabel bebas (Ghozali, 2013). Penilaian multikolonieritas dilaksanakan dengan memakai Variance Inflation Faktor (VIF) serta tolerance. angka yang pada umumnya digunakan dalam menyatakan tidak ada multikolonieritas yaitu angka tolerance harus  $\geq 0,10$  atau sama dengan angka Variance Inflation Faktor (VIF) dari masing-masing variabel  $\leq 10$ .

### 2.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013), uji heteroskedastisitas berguna dalam melakukan penilaian apakah dalam model bentuk regresi ketemu perbedaan varians dari selisih satu pemantauan ke pemantauan lain. Jika varians dari residual satu pemantauan ke pemantauan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika tidak sama disebut heterokedastisitas. bentuk regresi yang bagus adalah pada saat homoskedastisitas atau tidak terdapat heteroskedastisitas.

## 2.6 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis adalah uji perbedaan antara angka sampel dengan populasi atau angka data yang diamati dengan angka diharapkan (hipotesis) peneliti (Erlina, 2011). Pengujian hipotesis dalam riset ini memakai koefisien Determinasi ( $R^2$ ), uji F, dan uji t.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

### 3.1 Hasil Penelitian

#### 3.1.1 Hasil Kualitas Data

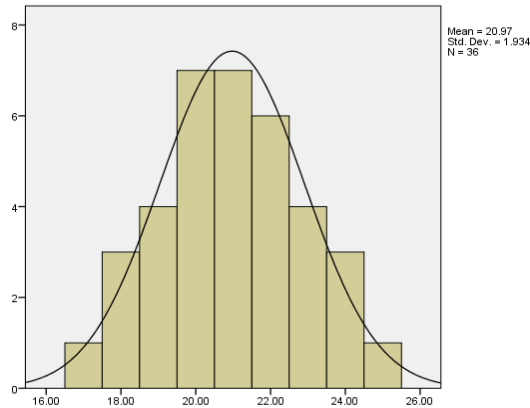
##### 3.1.1.1 Uji Validitas

Dari hasil pengujian Validitas, butir pertanyaan harus valid jika memiliki  $R_{tabel}$  diatas 0,329 yang didapat dari  $df = 36 - 2$  maka  $R(34;005) = 0,329$ . Dari hasil pengujian semua butir pertanyaan variable memenuhi validitas karena nilainya semua di atas 0,329 dan sudah bisa dibuat pengujian selanjutnya.

##### 3.1.1.2 Uji Reliabilitas

Hasil Pengujian Uji Reliabilitas diperoleh 0,826 untuk variable system pengendalian internal, 0,868 untuk variable kapasitas sumber daya manusia, 0,776 untuk variable Pemeriksaan dan 0,716 untuk Kecakapan Aparatur, dan 0,722 Akuntabilitas Keuangan Desa. maka dengan demikian karena sudah memenuhi unsur validitas dan reliabilitas maka pengujian selanjutnya yaitu uji asumsi klasik sudah bisa dilakukan.

**3.1.2 Uji Asumsi Klasik**  
**3.1.2.1 Uji Normalitas**



**Gambar 3. Hasil Histogram**  
*Sumber: Data Primer (Diolah)*

**Tabel 2. Hasil Normalitas**

		Unstandardiz
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std.	1.39462884
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.072
	Negative	-.110
Test Statistic		.110
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c</sup>

*Sumber: Data Primer (Diolah)*

Untuk uji normalitas, penulis memakai grafik histogram dapat disimpulkan bahwa histogram bermodel lonceng sempurna, maka bisa dikatakan datanya normal. Selain melihat dari grafik penulis juga menguji statistik kolmogorov smirnov, penulis mengecek nilai signifikannya jika diatas 0,05 maka data dapat diutarakan berdistribusi normal dalam hal pengujiannya didapat nilai signifikannya 0,200 artinya datanya dapat dikatakan normal sebab nilai signifikannya diatas 0,05.

**3.1.2.2 Uji Multikolonieritas**

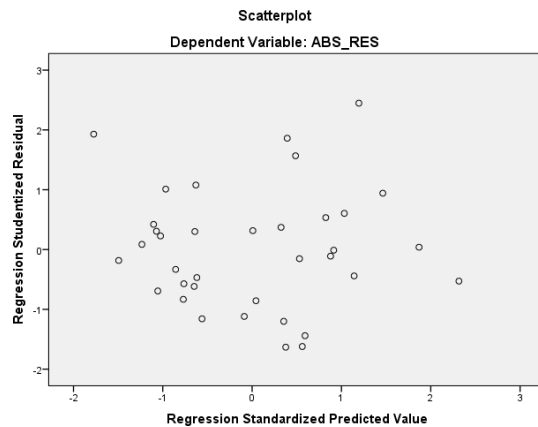
**Tabel 3. Hasil Multikolonieritas**

Variabel	Tolerance	VIF
Sistem Pengendalian Internal	.702	1.424
Kapasitas Sumber Daya Manusia	.683	1.465
Pemeriksaan	.894	1.119
Kecakapan Aparatur	.934	1.070

*Sumber: Data Primer (Diolah)*

Hasil pemeriksaan Multikolonieritas secara jelas menunjukkan bahwa nilai tolerance diantaranya variable independen <1,00 dan nilai dari VIF > 0,1. Hal tersebut mengemukakan bahwa tidak terjadi gejala Multikolonieritas antara variable independen dalam riset ini.

3.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Primer (Diolah)

Gambar 4. Grafik Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Glejser

Variabel	Signifikansi
Sistem Pengendalian Internal	.795
Kapasitas Sumber Daya Manusia	.998
Pemeriksaan	.786
Kecakapan Aparatur	.918

Sumber: Data Primer (Diolah)

Uji heteroskedastisitas dalam riset ini dibuat untuk melihat grafik scatterplot, adapun hasilnya bisa dilihat pada titik-titik atau lingkaran kecil yang merata secara sembarangan di atas maupun di bawah angka 0. Agar pengamatan lebih akurat maka penulis juga melakukan uji glejser dalam hal ini penulis melihat nilai signifikannya tidak boleh dibawah 0,05, dari hasil pengamatan terlihat nilai signifikannya di atas 0,05 sehingga dapat diutarakan tidak terdapat heteroskedastisitas dan dapat dibuat untuk pengujian tahap selanjutnya.

3.1.3 Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	T <sub>hitung</sub>	T <sub>tabel</sub>	Sig.
(Constant)	14.305	1.601		.119
Sistem Pengendalian Internal	.148	2.246	2.039	.032
Kapasitas Sumber Daya Manusia	.336	3.093	2.039	.004
Pemeriksaan	-.267	-2.962	2.039	.006
Kecakapan Aparatur	.262	2.630	2.039	.013

Sumber: Data Primer (Diolah)

Dari table 4 ini dapat disajikan persamaan regresinya berikut ini:

$$Y = 14.305 + 0,148X_1 + 0,336X_2 - 0,267X_3 + 0,262X_4 + e$$

Berdasarkan hasil Tabel 5 nilai  $T_{hitung}$  variable system pengendalian internal sebesar 2,246 lebih besar dari  $T_{tabel}$  yakni 2,039 dan nilai signifikansi sebesar  $0,032 < 0,05$  maka dapat dinyatakan bahwa Sistem pengendalian internal memiliki dampak yang positif serta signifikan kepada Akuntabilitas keuangan desa ( $H_1$  diterima), untuk variable Kapasitas Sumber Daya Manusia didapat  $T_{hitung}$  sebesar 3,093 lebih besar dari  $T_{tabel}$  yakni 2,039 serta nilai signifikansi sebesar 0,004 maka dapat dinyatakan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia berdampak positif dan signifikan kepada akuntabilitas keuangan desa ( $H_2$  diterima), untuk variable Pemeriksaan didapat  $T_{hitung}$  sebesar -2,962 lebih kecil dari  $T_{tabel}$  yakni 2,039 serta nilai signifikansi sebesar 0,006 maka dapat dinyatakan bahwa Pemeriksaan berdampak negative dan signifikan kepada akuntabilitas keuangan desa ( $H_3$  ditolak), dan yang terakhir variable Kecakapan Aparatur didapat  $T_{hitung}$  yakni sebesar 2,630 > dari  $T_{tabel}$  yaitu sebesar 2,039 dan nilai signifikansi sebesar 0,013 maka dapat dikatakan bahwa Kecakapan Aparatur berdampak positif serta signifikan kepada Akuntabilitas keuangan desa yang terletak di desa Kecamatan Siempat Nempu Hulu.

### 3.1.4 Koefisien Determinasi

**Tabel 6. Hasil Adjusted R<sup>2</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.686 <sup>a</sup>	.470	.403

*Sumber: Data Primer (Diolah)*

Dari pengujian determinasi diperoleh adjusted  $R^2 = 0,403$  yang artinya sebesar 40,3% Akuntabilitas keuangan desa dapat diterangkan oleh variable Sistem pengendalian internal, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemeriksaan dan Kecakapan Aparatur sedangkan selebihnya sebesar 59,7% dapat diterangkan selain variable yang penulis teliti dalam riset ini karena adanya keterbatasan dan waktu yang dimiliki oleh penulis.

## 3.2 Diskusi

### 3.2.1 Dampak Sistem Pengendalian Internal Kepada Akuntabilitas Keuangan Desa

Hasil Hipotesis  $H_1$  diterima, artinya Sistem Pengendalian Internal berdampak positif dan signifikan kepada Akuntabilitas Keuangan Desa, dalam hal ini jika semakin bagus Sistem Pengendalian Internal yang diberikan oleh pihak pemerintahan desa pada desa Kecamatan Siempat Nempu Hulu akan diikuti semakin bagus pula akuntabilitas keuangan desa yang dilaksanakan. Berarti dalam hal ini pemerintah desa yang terdapat di desa Kecamatan Nempu Hulu telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal dalam akuntabilitas keuangan desa sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan, hal ini juga seiring dengan riset yang dilaksanakan oleh (Putra et al., 2021); (Sari & Andra Asmara, 2021); (Ramadhan & Fefri Indra Arza, 2021); (Suharti & Rumsari, 2021); (Yennisa et al., 2020); (Karyadi, 2019); (Wahyuni et al., 2018); dan (Wahyuni et al., 2018) yang mengemukakan bahwa system pengendalian internal berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa tetapi bertolak belakang dengan (Pahlawan et al., 2020); (Sundari & Mulyadi, 2018); dan (Mutmainah & Pramuka, 2017) yang mengemukakan bahwa system pengendalian internal tidak berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa.

### 3.2.2 Dampak Kualias Sumber Daya Manusia Kepada Akuntabilitas Keuangan Desa

Hasil Hipotesis  $H_2$  diterima, artinya Kapasitas Sumber Daya Manusia berdampak positif kepada Akuntabilitas Keuangan Desa, ini berarti jika Kapasitas Sumber Daya Manusia kuat maka akan mengakibatkan Akuntabilitas keuangan desa semakin kuat dan begitu

sebaliknya jika Kapasitas sumber daya manusia lemah, maka akuntabilitas keuangan desa akan semakin lemah juga, hal ini menjadi catatan bagi pemerintah yang terdapat di desa kecamatan Siempat Nempu Hulu agar Kapasitas Sumber daya yang diberikan selama ini harus dipertahankan agar akuntabilitas keuangan desa dapat terus makin baik riset ini setara dengan yang dibuatoleh (Nurhayati et al., 2021); (Latif et al., 2021); (Azkia et al., 2016); (P. et al., 2020); (Karyadi, 2019) yang mengemukakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa, dan bertolak belakang (Mahyudin et al., 2022); dan (Posi & Putra, 2019) yang mengemukakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa.

### **3.2.3 Dampak Pemeriksaan Kepada Akuntabilitas Keuangan Desa**

Hasil Hipotesis H<sub>3</sub> ditolak, artinya pemeriksaan berdampak negative dan signifikan kepada akuntabilitas keuangan desa, ini berarti semakin kuat pemeriksaan tetapi tidak diikuti dengan semakin kuat pula akuntabilitas keuangan desa, dan begitu sebaliknya, apabila pemeriksaan lemah maka akuntabilitas keuangan desa akan makin kuat, berarti selama ini pemeriksaan pada desa di kecamatan Siempat Nempu Hulu tidak berjalan dengan semestinya akibatnya akuntabilitas keuangan desa kurang kredibel, untuk kedepannya BPD harus bekerja secara maksimal dalam pemeriksaan tatakelola keuangan desa serta pihak inspektorat harus terjun kelapangan untuk melihat bagaimana tatakelolakeuangan desa yang selama ini terjadi, apakah sudah tepat dengan standar yang telah ditetapkan, agar kedepannya fungsi pemeriksaan ini dapat menaikkan akuntabilitas keuangan desa. Riset ini setara dengan yang dibuatoleh (Indriswari & Wianto Putra, 2021) yang mengutarakan bahwa pemeriksaan tidak berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa, dan tidak setara dengan (Making & Handayani, 2021); (Widia Yulianti et al., 2019); (Aprilia, 2019); (Umaira & Adnan, 2019) Yang mengutarakan pemeriksaan berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa.

### **3.2.4 Dampak Kecakapan Aparatur Kepada Akuntabilitas Keuangan Desa**

Hasil Hipotesis H<sub>4</sub> diterima, artinya kecakapan aparatur berdampak positif dan signifikan kepada Akuntabilitas Keuangan Desa, ini berarti jika kecakapan aparatur kuat maka akan mengakibatkan Akuntabilitas keuangan desa semakin kuat dan begitu sebaliknya jika kompetensi aparatur lemah, maka akuntabilitas keuangan desa akan semakin lemah juga, hal ini berarti kecakapan aparatur di desa Kecamatan Siempat Nempu Hulu sudah kompeten, maka dengan demikian perlu dipertahankan kedepannya agar akuntabilitas keuangan desa dapat tetap akuntabel sesuai dengan harapan principal, riset ini setara dengan yang dibuatoleh (Mohammad Akbar Hakiki & Syarif Hidayat, 2022); (Rifa'i et al., 2021); (Puspa & Prasetyo, 2020); dan (Pahlawan et al., 2020) yang mengemukakan bahwa kecakapan aparatur berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa, dan bertolak belakang (Suharti & Rumsari, 2021); (Sweetenia et al., 2019); (Widyatama et al., 2017) yang mengemukakan bahwa kecakapan aparatur tidak berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa.

Dari hasil riset ini ternyata system pengendalian internal, kapasitas sumber daya manusia dan kecakapan aparatur yang berdampak positif dan signifikan kepada akuntabilitas keuangan desa, sedangkan pemeriksaan berdampak negative kepada akuntabilitas keuangan desa di desa yang terdapat di Kecamatan Siempat Nempu Hulu pada masa pandemi covid-19, dan ini menjadi catatan penting bagi inspektorat Kabupaten Dairi agar sering datang ke desa-desa yang terdapat pada kecamatan tersebut untuk melihat bagaimana tatakelolakeuangan desa disana apakah sudah betul-betul berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan begitu juga BPD agar melaksanakan fungsinya sebagai pemeriksaan internal dalam pemerintahan desa tersebut.



## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Dari penjelesan yang penulis kemukakan dalam riset ini, maka penulis menarik keputusan dari riset ini yaitu bahwa system pengendalian internal, kapasitas sumber daya manusia dan kecakapan aparatur yang berdampak positif dan signifikan kepada akuntabilitas keuangan desa, sedangkan pemeriksaan hanya berdampak negative terhadap akuntabilitas keuangan desa yang terdapat pada desa di Kecamatan Siempat Nempu Hulu pada masa pandemi covid-19.

### 4.2 Keterbatasan

Adapun yang menjadi keterbatasan dalam riset ini adalah akuntabilitas keuangan desa hanya dilihat dari variable system pengendalian internal, kapasitas sumber daya manusia, pemeriksaan dan kecakapan aparatur, responden riset ini hanya menggunakan kepala desa, sekretaris desa dan kaur keuangan yang terdapat di desa Kecamatan Siempat Nempu Hulu serta metode yang dipakai metode kuantitatif.

### 4.3 Saran

Adapun saran untuk riset selanjutnya adalah mengganti responden riset yaitu semua Badan perwakilan desa, dan memperluas desa yang akan diteliti serta menambahkan variable riset seperti komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi untuk dapat menaikkan dampak kepada akuntabilitas keuangan desa.

### 4.4 Implikasi Penelitian

Implikasi riset ini adalah dengan adanya system pengendalian internal, kapasitas sumber daya manusia, pemeriksaan dan kecakapan aparatut dapat menjadikan akuntabilitas keuangan desa menjadi semakin baik pada masa pandemi covid-19 yang terdapat pada desa-desa diseluruh Indonesia khususnya desa yang terdapat di Kecamatan Siempat Nempu Hulu.

## 5. REFERENSI

- Admin. (2021). *Tantangan dan Masalah Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Pendampingandesa.Com. <https://pendampingdesa.com/tantangan-dan-masalah-implementasi-pengelolaan-keuangan-desa-2/>
- Aprilia, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 109–122. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.18>
- Azkia, Basri, H., & Darwanis. (2016). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(4), 22–32.
- BKN. (2013). *Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil*. 1–135.
- Gunawan, F. (2021). *Penggunaan Dana Desa Pegagan Julu VII Diduga Bermasalah*. Medanbisnisdaily. [https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/07/25/139759/penggunaan\\_dana\\_desa\\_pegagan\\_julu\\_vii\\_diduga\\_bermasalah/](https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/07/25/139759/penggunaan_dana_desa_pegagan_julu_vii_diduga_bermasalah/)
- Hardiningsih, P., Januarti, I., Srimindarti, C., & Oktaviani, R. M. (2019). Does the characteristics of regional government and complexity affect on the disclosure regional

- financial statements? *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 23(2), 106–116. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss2.art5>
- Indriswari, P. T., & Wianto Putra, I. M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(1), 5–10. <https://doi.org/10.22225/jraw.2.1.2905.5-10>
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan desa (studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani\_Universitas Gunung Rinjani*, 7(2), 33–46. <https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/123>
- Kresno. (2019). *Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah*. DPR RI. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah>
- Latif, A., Savitri, E., & Susilatri. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi empiris pada pemerintah desa di Kabupaten Solok, Sumatra Barat). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 183–192.
- Mahawyaharti, T., & Budiasih, G. N. (2016). Asimetri Informasi, Leverage, dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(2), 100–110. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i02.p05>
- Mahyudin, Mihzan, L. M. F., Asrin, & Nurlinda. (2022). Sumber daya manusia pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 82–88.
- Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(10), 1–15.
- Marbun, J. (2021). *Pengadaan Bak PAMSIMAS Diduga Tumpang Tindih, Dibangun Didompleng di Kantor Desa*. Jaya Pos News. <https://jayaposnews.co.id/2021/07/10/pengadaan-bak-pamsimas-diduga-tumpang-tindih-dibangun-didompleng-di-kantor-desa/>
- Mohammad Akbar Hakiki, & Syarif Hidayat. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Akuntabilitas dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>
- Mutmainah, I., & Pramuka, B. A. (2017). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 319(14).
- Nurhayati, N., Purnama, D., & Mustika, M. (2021). Faktor-Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 215–234. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.4072>
- P., S. W. D. A. A., Angi, Y. F., & Rafael, S. J. M. (2020). Call for Paper Call for paper. *Conference on Economic and Business Innovation*, 1736–1751.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162–172. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>

- Permendagri. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa*.
- Permendagri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Perpres. (2022). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022*.
- Posi, S. H., & Putra, S. P. A. M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Pemerintah Kecamatan Morotai Selatan. *Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 3(2), 76–86.
- PP. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Putra, R. D., Wibowo, R. E., & Nurcahyono, N. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kecamatan Losari. *Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 11(2), 110–122.
- Rachmad, A. A. (2013). Pengaruh Penerapan Corporate Governance Berbasis Karakteristik Manajerial Pada Kinerja Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(3), 678–696.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewrship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Ramadhan, W., & Fefri Indra Arza. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(4), 822–835. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>
- Rifa'i, M., Jubertus, J., & Susanti, R. A. D. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pajak, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 919–928. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.16044>
- Sari, N., & Andra Asmara, J. (2021). Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 142–149.
- Suharti, S., & Rumsari, E. T. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi terhadap Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Competitive*, 16(2), 95–104.
- Sundari, D., & Mulyadi, J. M. . (2018). Kompetensi Pengelola Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Di Kementerian Pertahanan Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(01), 26–36. <https://doi.org/10.35838/jrap.v5i01.170>
- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 44–56. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2752>
- Tumangger. (2019). *Masyarakat Berhak Menanyakan Ketransparanan Kepala Desa Dalam*

- Penggunaan Dana Desa. Poskota Sumatera.*  
<https://www.poskotasumatera.com/2019/09/masyarakat-berhak-menanyakan.html>
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi(JIMEKA)*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Wahyuni, S., Indrawati, N., & Azhar L, A. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengerolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Ekonomi*, 26(3), 98–110.
- Widia Yulianti, Kamaliah, & Rasuli. (2019). Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018). *Jurnal Ekonomi*, 27(4), 386–398. <http://je.ejournal.unri.ac.id/>
- Widyatama, A., Lola, N., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>
- Yennisa, Wahyuningsih, S., & Budiarto, D. S. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa pada Kecamatan Gamping. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 11(1), 49–56.

